



# **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020**



## **Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

**Jl. Tingang Menteng No. 39**

**Pulang Pisau**

**Telp. (0513) 2027516**

**Email : [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)**

**KETUA DAN WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**



**AGUNG NUGROHO, S.H.**

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II



**NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

**HAKIM  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**



Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.



Silvia Kumalasari, S.H.



Dwi Fahriyah Suci Angraini, S.H.



Ishmatul Lu`Lu, S.H.



Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H.



Niken Anggi Prajanti, S.H.



Ismaya Salindri, S.H.

**PEJABAT STRUKTURAL  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**



**M. YUNAN, S.H.**  
Panitera



**I MADE LANDEP, S.H.**  
Sekretaris

**PEJABAT STRUKTURAL  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**



Dede Andreas, S.H., M.H.  
Panitera Muda Perdata



Laili Rahmah, A.Md., S.H.  
Kasubag Kepegawaian, Organisasi  
dan Tata Laksana



Noorhayati, S.Kom., S.H.  
Panitera Muda Pidana



Samsul Rizal, S.H.  
Kasubag Perencanaan, TI dan  
Pelaporan



Lelo Herawan, S.H.  
Pidana Muda Hukum



Muhammad Rusgiansyah S.Hut., S.H.  
Kasubag Umum dan Keuangan

# Pengantar

**S**yukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat melalui tahun 2020 dengan lancar, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya telah disusun dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Dengan berakhirnya tahun 2020 berarti Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini.

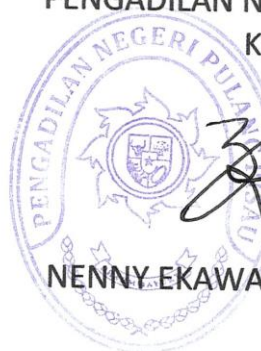
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini berisi laporan pelaksanaan tugas peradilan selama tahun 2020 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung, juga sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas di tahun yang akan datang.

Demikian penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Pulang Pisau, 15 Januari 2020

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
KETUA



NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

# Daftar Isi

Halaman Judul	
Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Bab I    Pendahuluan .....	1
Bab II    A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	5
– Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	5
– Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	5
– Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	5
– Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	5
B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	5
– Jumlah sisa perkara yang diputus .....	5
– Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	6
– Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK .....	7
– Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi .....	8
– Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi .....	8
C. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	8
– Posbakum .....	8
– Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu .....	9
– Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) .....	9
Bab III   Sumber Daya Manusia .....	13
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	
– Mutasi .....	13
– Promosi .....	13
– Pensiun .....	13

–	Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	13
–	Data Honorer .....	13
–	Hukuman Disiplin .....	14
<b>Bab IV</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana, dan Teknologi</b>	
	<b>Informasi Pengelolaan Keuangan</b>	<b>17</b>
	<b>A. Pengelolaan Keuangan</b>	<b>17</b>
	<b>B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>18</b>
	<b>C. Pengelolaan Teknologi Informasi</b>	<b>21</b>
	– Implementasi e-court di lingkungan PN Pulang Pisau .....	21
	– Implementasi Eraterang di lingkungan PN Pulang Pisau .....	22
	– Implementasi SIPP di lingkungan PN Pulang Pisau .....	24
<b>Bab V</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Publik .....</b>	<b>30</b>
–	Akreditasi Penjaminan Mutu .....	30
–	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	31
–	Inovasi Pelayanan Publik .....	34
<b>Bab VI</b>	<b>Pengawasan .....</b>	<b>39</b>
	<b>A. Internal .....</b>	<b>39</b>
	<b>B. Evaluasi .....</b>	<b>40</b>
<b>Bab VII</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>45</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
	<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>45</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan instansi vertikal dibawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Pulang Pisau, mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035. Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah :

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
  - a. Pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
  - b. Pengelolaan sumber daya manusia
  - c. Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
  - d. Pembaruan pengelolaan anggaran
  - e. Pembaruan pengelolaan Aset
  - f. Pembaruan Teknologi Informasi
3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Misi Mahkamah Agung adalah :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi dan misi dalam cetak biru pembaruan peradilan tersebut diantaranya adalah dengan mewujudkan Refomasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya.

Untuk Tahun 2015-2020 Mahkamah Agung memiliki beberapa Program menengah diantaranya :

- 1) Revolusi mental/perilaku aparatur
- 2) Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung
- 3) Pengembangan Teknologi Informasi
- 4) Penguatan Pengawasan
- 5) Sumber Daya Manusia Aparatur
- 6) Peningkatan Pelayanan Publik

Keenam program tersebut merupakan program unggulan yang menjadi target terlaksananya program Mahkamah Agung 2015-2020 dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun dasar dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini adalah Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, serta mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

## RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Agar lebih mudah dan semakin menjelaskan arah sasaran strategis tersebut maka disusun Indikator Kinerja yang akan menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut Indikator Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	5 %

	Terpinggirkan		
<b>4</b>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%

## BAB II

### A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

- Keadaan perkara Tingkat Pertama  
Perkara Masuk sebanyak 1134 perkara
- Keadaan Perkara Tingkat Banding  
Perkara dimohonkan Banding sebanyak 14 perkara
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi  
Perkara dimohonkan Kasasi sebanyak 6 perkara
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali  
Perkara dimohonkan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara

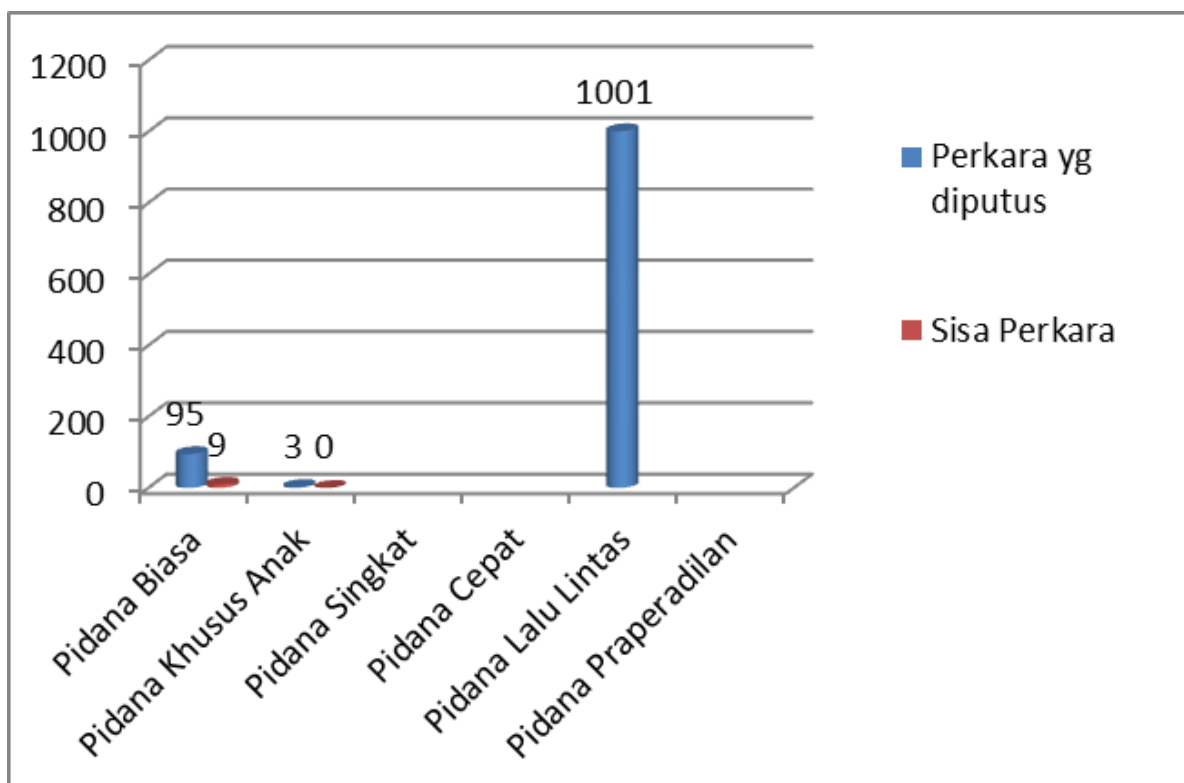
### B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

- Jumlah Sisa Perkara yang diputus

#### Pidana

No.	Nama	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket.
1	Pidana Biasa	100	95	9	Sisa Perkara Awal Tahun 2019 berjumlah 4
2	Pidana Khusus Anak	3	3	0	
3	Pidana Singkat				
4	Pidana Cepat				
5	Pidana Lalu Lintas	1001	1001		
6	Pidana Praperadilan				

Dari Perkara tersebut 78 Perkara tersebut persidangan dilaksanakan secara elektronik.



Secara Detail dapat dilihat pada tabel berikut

#### REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA

#### PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

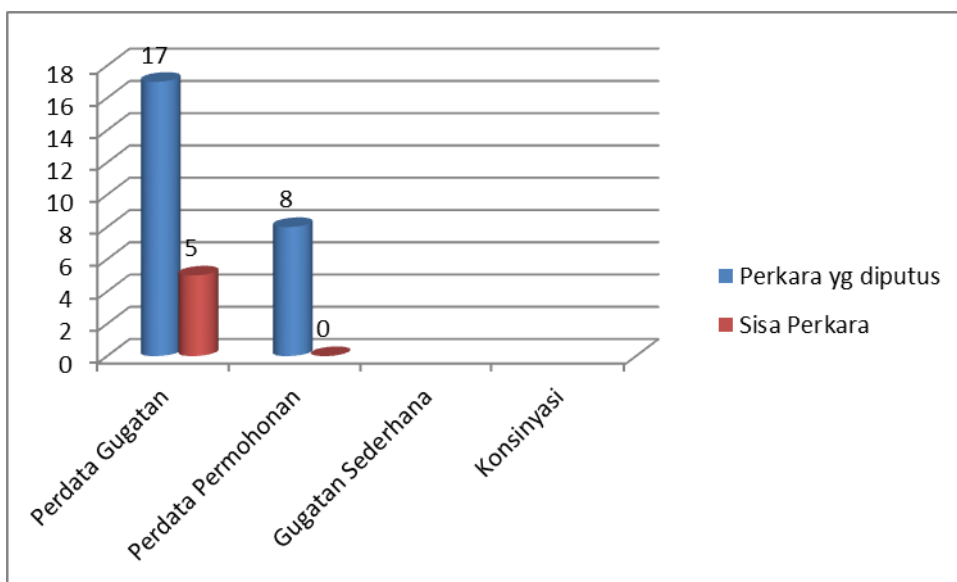
Januari - Desember 2020

No	Bulan	Sisa bulan lalu yang belum diminutasi	Masuk yang	Beban bulan ini	Putus	Belum penunjukan majelis hakim	Putus sampai bulan ini	Minutasi bulan ini	Putus belum minutasi	Sisa akhir perkara	Jumlah terdakwa	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	4	5	9	4	0	4	4	0	5	17	13
2	Februari	5	8	13	6	0	6	6	0	7	35	26
3	Maret	7	15	22	4	0	4	4	0	18	69	50
4	April	18	7	25	16	0	16	16	0	9	75	59
5	Mei	9	9	18	10	0	10	10	0	8	36	34
6	Juni	8	6	14	13	0	13	13	0	1	20	18
7	Juli	1	11	12	4	0	4	4	0	8	20	16
8	Agustus	8	7	15	7	0	7	7	0	8	26	22
9	Septem ber	8	8	16	10	0	10	10	0	6	32	29
1	Oktober	6	8	14	9	0	9	9	0	5	30	25

0																	
1	Novemb	5	7	12	6	0	6	6	0	6	18	15					
1	Desemb	6	9	15	6	0	6	6	0	9	31	20					
2	er																
<b>Total</b>			100		95			95			409	327					

## Perdata

No.	Nama	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket.
1	Perdata Gugatan	22	17	5	
2	Perdata Permohonan	8	8	0	
3	Gugatan Sederhana				
4	Konsinyasi				



Secara Detail Perdata Perbulan dapat dilihat pada tabel berikut

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN																	
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU																	
Januari - Desember 2020																	
N O	BULAN	Sisa bulan lalu			Ma suk	Beb an bula n ini	Putu s bula n ini	Belu m pemb agian majel is	Med iasi berh asil	Me dia si gag al	Gugu r	Cabu t	Jumla h putus	Juml ah medi asi berh asil	Min utasi bula n ini	Bel um min utasi	Sisa akhi r perk ara
		Bel um putus	Sudah putus belu m minutas i	Media si berhas il belu m minutas i													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	12	0	0	5	17	3	2	0	4	0	0	3	0	3	0	14
2	Februa ri	14	0	0	0	14	3	2	0	1	0	0	3	0	3	0	11
3	Maret	11	0	0	7	18	4	2	0	1	0	0	4	0	4	0	14
4	April	14	0	0	3	17	4	2	0	4	0	1	4	0	4	0	12

5	Mei	13	0	0	0	13	4	2	0	1	0	0	4	0	4	0	9
6	Juni	9	0	0	3	12	5	2	0	0	0	0	5	0	5	0	7
7	Juli	7	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3
8	Agustus	3	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
9	September	4	0	0	3	7	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	4
10	Oktober	4	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1
11	November	1	0	0	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12	Desember	4	0	0	3	7	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0	5
<b>TOTAL</b>					<b>30</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>37</b>						

Secara Detail Perdata Gugatan Perbulan dapat dilihat pada tabel berikut

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

#### Pidana

No.	Nama	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket.
1	Pidana Biasa	100	95	9	Sisa Perkara Awal Tahun 2019 berjumlah 4
2	Pidana Khusus Anak	3	3	0	
3	Pidana Singkat				
4	Pidana Cepat				
5	Pidana Lalu Lintas	1001	1001		
6	Pidana Praperadilan				

#### Perdata

No.	Nama	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket.
1	Perdata Gugatan	22	17	5	
2	Perdata Permohonan	8	8	0	
3	Gugatan Sederhana				
4	Konsinyasi				

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

#### PIDANA

##### Perkara Pidana Yang mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	URAIAN	TOTAL
1	Permohonan Banding	9
2	Pengiriman Berkas	11



3	Putusan PT	9
4	Belum Putus PT	2
5	Penerimaan PN	10
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	9

Perkara Pidana Yang Putus Selama Tahun 2020 berjumlah 98 Perkara. Dari 98 Perkara tersebut 9 Perkara Melakukan Upaya Hukum Banding, Sehingga Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding berjumlah 89 Perkara.

***Perkara Pidana Yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi***

NO	URAIAN	TOTAL
1	Permohonan Kasasi	4
2	Pengiriman Berkas	4
3	Putusan MA	4
4	Belum Putus MA	1
5	Penerimaan PN	1
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	3

Perkara Pidana Yang Putus Selama Tahun 2020 berjumlah 98 Perkara. Dari 98 Perkara tersebut 4 Perkara Melakukan Upaya Hukum Kasasi, Sehingga Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi berjumlah 94 Perkara.

***Perkara Pidana Yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali***

NO	URAIAN	TOTAL
1	Permohonan PK	0
2	Pengiriman Berkas	0
3	Putusan MA	0
4	Belum Putus MA	0
5	Penerimaan PN	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0

Perkara Pidana Yang Putus Selama Tahun 2020 berjumlah 98 Perkara. Dari 98 Perkara tersebut Tidak ada Perkara Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Sehingga Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali berjumlah 98 Perkara.

## Perdata

### *Perkara Perdata Yang mengajukan Upaya Hukum Banding*

NO	URAIAN	TOTAL
1	Permohonan Banding	5
2	Pengiriman Berkas	5
3	Putusan PT	5
4	Belum Putus PT	0
5	Penerimaan PN	4
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	5

Perkara Perdata Yang Putus Selama Tahun 2020 berjumlah 25 Perkara. Dari 25 Perkara tersebut 5 Perkara Melakukan Upaya Hukum Banding, Sehingga Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding berjumlah 20 Perkara.

### *Perkara Perdata Yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

NO	URAIAN	TOTAL
1	Permohonan Kasasi	2
2	Pengiriman Berkas	3
3	Putusan MA	0
4	Belum Putus MA	3
5	Penerimaan PN	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0

Perkara Pidana Yang Putus Selama Tahun 2020 berjumlah 25 Perkara. Dari 25 Perkara tersebut 2 Perkara Melakukan Upaya Hukum Kasasi, Sehingga Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi berjumlah 23 Perkara.

### *Perkara Pidana Yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*

NO	URAIAN	TOTAL
1	Permohonan PK	0
2	Pengiriman Berkas	0
3	Putusan MA	0
4	Belum Putus MA	0
5	Penerimaan PN	0

6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0
---	--------------------------------	---

Perkara Perdata Yang Putus Selama Tahun 2020 berjumlah 25 Perkara. Dari 25 Perkara tersebut Tidak ada Perkara Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Sehingga Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali berjumlah 25 Perkara.

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi

No	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2	Jumlah perkara yang berhasil di Mediasi pada Tahun 2020

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No.	Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi	Keterangan
1.	-	-

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu

- Posbakum

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum PERADI untuk bekerjasama dalam hal pemberian layanan antara lain:

- a. Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum
- b. Bantuan Pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hokum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Tahun Anggaran 2020 biaya yang tersedia untuk Jasa Pelayanan Bantuan Hukum Peradi dibiayai oleh DIPA Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 dengan tabel sebagai berikut :

No.	Pemberi Layanan Posbakum Tahun 2020	Jumlah Alokasi Dana Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	Keterangan
1.	LBH PERADI	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	240 Jam Layanan

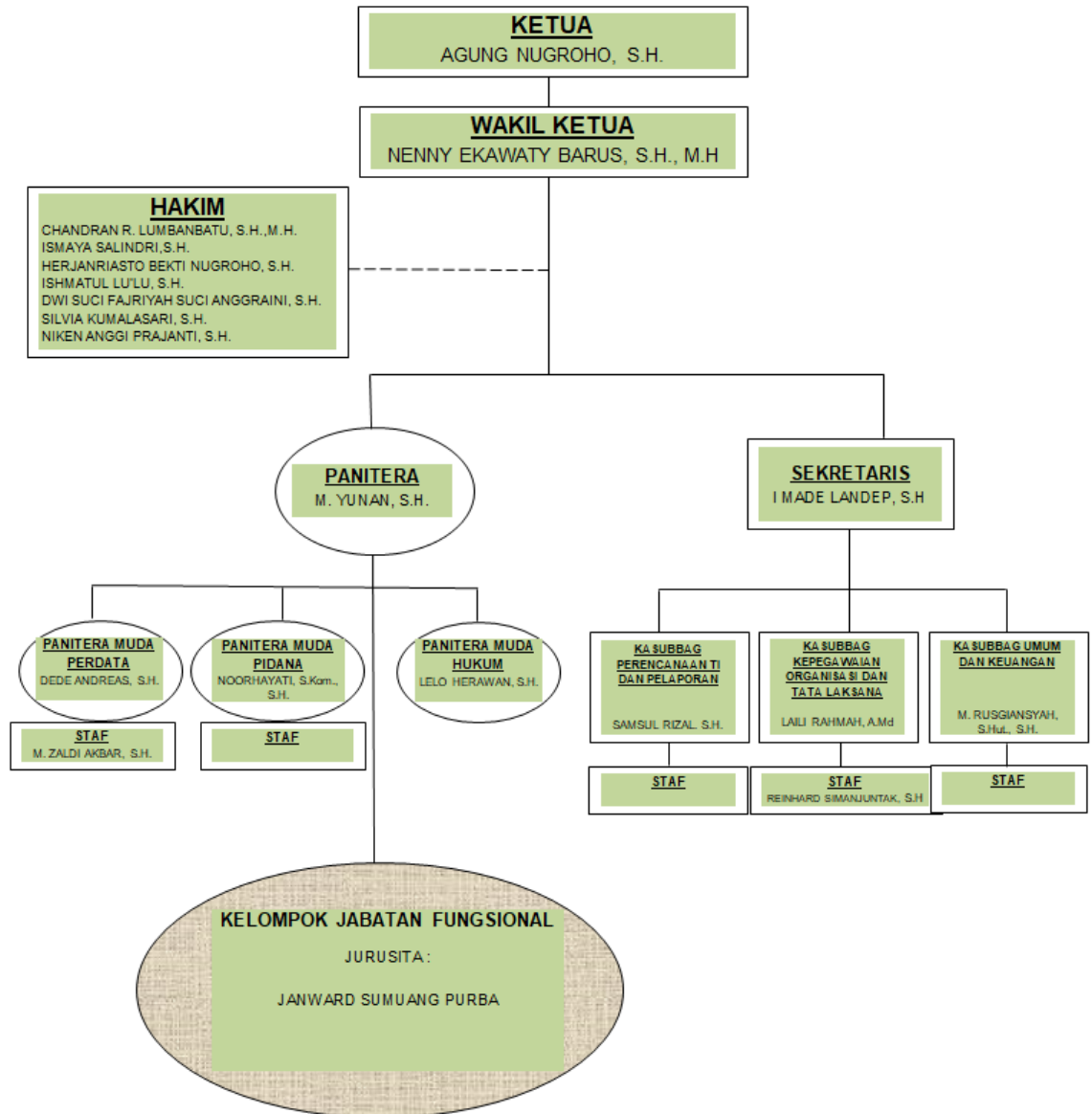
- Sidang keliling/pelayanan terpadu Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak memperoleh Anggaran Untuk Sidang Keliling
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak memperoleh anggaran Perkara Prodeo.

No.	Nomor Perkara yang menggunakan Prodeo Tahun 2020	Jumlah Alokasi Dana Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	Keterangan
NIHIL				

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

### A. Struktur Organisasi



Daftar Hakim dan Pegawai (per 31 Desember 2020) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Agung Nugroho, SH	197203072000031003	Ketua Pengadilan
2	Nenny Ekawaty Barus, SH,MH	197701122001122001	Wakil Ketua Pengadilan
3	Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.	198608152011011011	Hakim Tingkat Pertama

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

4	Ismaya Salindri, S.H.	199105012017122002	Hakim Tingkat Pertama
5	Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H.	199201042017121003	Hakim Tingkat Pertama
6	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	199312132017122001	Hakim Tingkat Pertama
7	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	199402102017122002	Hakim Tingkat Pertama
8	Silvia Kumalasari, S.H.	199408162017122002	Hakim Tingkat Pertama
9	Niken Anggi Prajanti, S.H.	198910082017122001	Hakim Tingkat Pertama
10	M. Yunan, S.H.	196202011985031006	Panitera Tingkat Pertama
11	I Made Landep, SH	197210041993031006	Sekretaris
12	Lelo Herawan, S.H.	198501142009041003	Panitera Muda
13	Dede Andreas, S.H., M.H.	198202122005021003	Panitera Muda
14	Noorhayati, S.Kom.,S.H.	197708092009122002	Panitera Muda
15	Muhammad Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	197209242006041014	Kepala Sub Bagian
16	Samsul Rizal, S.H.	198404042006041004	Kepala Sub Bagian
17	Laili Rahmah, A.Md. S.H.	198012242009122005	Kepala Sub Bagian
18	Reinhard Simanjuntak, S.H.	199408202019031005	Analisis SDM Aparatur
19	M. Zaldi Akbar, S.H.	199410122019031006	Analisis Perkara Peradilan
20	Janward Sumuang Purba	197901102001121001	Juru Sita
21	Maria Faustina Beata, S.H.	199511132017122002	Calon Hakim

B. Komposisi SDM (per 31 Desember 2020)

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	-	1
5	Pembina	IV/a	-	1	1
6	Penata Tk. I	III/d	1	-	1
7	Penata	III/c	4	1	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	-	2	2
9	Penata Muda	III/a	3	7	10
10	Pengatur Tk. I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	-	-	-
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	-	-	-

2. Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	1	1
2	Magister (S-2)	3	2	5
3	Sarjana (S-1)	8	6	14
4	Diploma (D-3)	-	-	-
5	SLTA/Sederajat	1	-	1

6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Doktoral (S-3)	-	1	1

## ➤ MUTASI

### Data Mutasi Pegawai Masuk Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru
1.	Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H.	Cakim PN Pinrang	Hakim PN Pulang Pisau
2.	Laili Rahmah, A.Md., S.H.	Pelaksana PN Palangka Raya	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Pulang Pisau

### Data Mutasi Keluar Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru
-	-	-	-

## ➤ PROMOSI

### Data Promosi Selama Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru
1.	Ismaya Salindri, S.H.	Cakim PN Pulang Pisau	Hakim PN Pulang Pisau
2.	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	Cakim PN Pulang Pisau	Hakim PN Pulang Pisau
3.	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	Cakim PN Pulang Pisau	Hakim PN Pulang Pisau
4.	Silvia Kumalasari, S.H.	Cakim PN Pulang Pisau	Hakim PN Pulang Pisau
5.	Reinhard Simanjuntak, S.H.	CPNS PN Pulang Pisau	PNS PN Pulang Pisau
6.	M. Zaldi Akbar, S.H.	CPNS PN Pulang Pisau	PNS PN Pulang Pisau

## ➤ PENSIUN

### Data Hakim dan Pegawai yang Pensiun Selama Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	TMT	Keterangan

## ➤ DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

### Data Tenaga Teknis/Non Teknis yang Mengikuti Diklat Selama Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Diklat yang Diikuti

No.	Nama	Jabatan	Diklat yang Diikuti
1.	I Made Landep, SH	Sekretaris	Diklat PKP
2.	Samsul Rizal, S.H.	Kasubbag. PTIP	Diklat PKP
3.	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Analisis SDM Aparatur	Diklat Bendahara
4.	M. Zaldi Akbar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Diklat Bendahara

### Data Honorer Selama Tahun 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, telah menunjuk 8 (delapan) orang pegawai honorer/tenaga kontrak yang masing-masing ditugaskan sebagai :

No.	NAMA	TUGAS/JOB	PEND.	KET.
1.	MUHAMMAD DIAN G. M.	Pramubakti	SLTA	-
2.	OKTAVIANA	Pramubakti	SLTA	-
3.	AHMAD FAISAL ROSADI	Pramubakti	SLTA	-
4.	ALFI FAHMI	Pramubakti	SLTA	-
5.	GERYAWAN	Pramubakti	SLTA	-
6.	VICKY KRISLI	Pramubakti	D3	-
7.	R O N Y	Pramubakti	SLTA	-
8.	SINTA KARTIKA SARI	Pramubakti	SLTA	-

### ➤ HUKUMAN DISIPLIN

#### Data Tenaga Teknis/Non Teknis yang Mengikuti Diklat Selama Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Hukdis yang diberikan
<b>NIHIL</b>			



## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (petungjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2020 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 9,895,023,000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) terealisasi sebesar 9,837,709,851 atau 99.42%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu Belanja Pegawai	: Rp. 2,579,931,000
Realisasi Anggaran	: Rp. 2,558,919,397
Sisa Anggaran	: Rp. 21,011,603
Persentase Realisasi Anggaran	: 99.19%
b. Pagu Belanja Barang	: Rp. 859,538,000
Realisasi Anggaran	: Rp. 823,300,502
Sisa Anggaran	: Rp. 36,237,498
Persentase Realisasi Anggaran	: 95.78%
c. Pagu Belanja Modal	: Rp. 6,455,554,000
Realisasi Anggaran	: Rp. 6,455,489,952
Sisa Anggaran	: Rp. 64,048
Persentase Realisasi Anggaran	: 100.00%

Dalam pelaksanaan DIPA 005.01 mengalami beberapa 6 Kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA.

- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 68,550,000 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Belanja Barang	: Rp. 68,550,000
Realisasi Anggaran	: Rp. 61,266,000
Sisa Anggaran	: Rp. 7,284,000
Persentase Realisasi Anggaran	: 89.37%

Dalam pelaksanaan DIPA 005.03 mengalami beberapa Dua Kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA.

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Pengadilan Negeri Pulang Pisau Merupakan Satuan Kerja baru sehingga belum memiliki Gedung Kantor dan Rumah Dinas. Namun Pengadilan negeri Pulang Pisau telah memiliki Hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Gedung dan Tanah pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI. Adapun Sarana dan Prasara berupa Asset pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

No	Nama Sarana dan Prasarana	Satua	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	<b>10,012</b>
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	<b>2</b>
3	Sepeda Motor	Unit	<b>2</b>
4	Lemari Besi/Metal	Buah	<b>4</b>
5	Lemari Kayu	Buah	<b>2</b>
6	Mesin Absensi	Buah	<b>1</b>
7	Meja Kerja Kayu	Buah	<b>15</b>
8	Kursi Besi/Metal	Buah	<b>26</b>
9	Kursi Kayu	Buah	<b>3</b>
10	Sice	Buah	<b>3</b>
11	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	<b>6</b>
12	Meja Rapat	Buah	<b>3</b>
13	A.C. Split	Buah	<b>6</b>
14	Televisi	Buah	<b>1</b>
15	Camera Video	Buah	<b>1</b>
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	<b>4</b>

17	Komputer Jaringan Lainnya		1
18	P.C Unit	Buah	16
19	Lap Top	Buah	5
20	Monitor	Buah	1
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10
22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2
23	Router	Buah	1
24	Hub	Buah	1
25	Rak Server	Buah	1
26	Kabel UTP	Buah	1
27	Wireless Access Point	Buah	2
28	<b>Peralatan Jaringan Lainnya</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Berikut adalah data kendaraan bermotor dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Pulang Pisau :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I. Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1.	Toyota ALL NEW RUSH 1.5 G M/T (VIN 2018)	2018	✓	-	-	Mobil Dinas Wakil Ketua
2.	Toyota Kijang Innova	2019	✓	-	-	Mobil Dinas Ketua
3	Toyota Kijang Rush					Mobil Dinas Operasional / Sekretaris
<b>II. Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda New CB150 VERZA CW-	2018	✓	-	-	Motor Dinas Panitera

2.	Honda New Vario 2018 125 CBS ISS - 2018		✓	-	-	Motor Dinas Operasional
----	---	--	---	---	---	-------------------------------

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sarana dan Prasana disesuaikan dengan standar Akreditasi Penjamin Mutu sehingga bisa meningkatkan kinerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya dan masyarakat yang diberikan pelayanan mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di Pengadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II :

No	Sarana/Prasarana	Juml	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Sarana/Prasarana Gedung</b>		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	1	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	4	
9.	Ruang Kesekretariatan	4	
10.	Ruang Panitera Pengganti	-	
11.	PTSP	1	
12.	Ruang Mediasi/Diversi/Inzage	1	
13.	Ruang Jaksa	1	
14.	Ruang Posbakum	1	
15.	Ruang Penasihat Hukum	1	
16.	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
17.	Perpustakaan	1	
18.	Ruang IT	-	
19.	Ruang Arsip	1	
20.	Ruang Persediaan	-	
21.	Ruang Barang Bukti	-	
22.	Gudang	1	
23.	Ruang Ibu Menyusui/Laktasi	1	
24.	Ruang Tahanan Pria	1	
25.	Ruang Tahanan Wanita	1	

26.	Mushola	1
27.	Ruang Tamu Terbuka	1
28.	Tempat Merokok / Smoking	-
29.	Toilet	2
30.	Toilet Difabel	-
31.	Ruang Tunggu Pengunjung	1
32	<b>Pos Satpam / Keamanan</b>	-

### C. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat penting. Secara umum, Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai pelayan masyarakat (public service) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Selain itu, bagi internal Peradilan Umum juga telah dipermudah dalam mengakses informasi informasi yang terbaru baik dari Pengadilan Tingkat Banding atau dari Dirjen Badilum maupun Mahkamah Agung RI. Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### ➤ Dukungan perangkat penunjang Teknologi Informasi

- Website Sejak tahun 2018 Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah membangun situs resmi [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id) guna mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi internet. Sampai dengan saat ini situs tersebut dapat terus diakses dan memberikan informasi-informasi yang disajikan dalam tampilan standar sesuai dengan pedoman Dirjen Badilum untuk memudahkan para pencari keadilan mendapat informasi. Berikut tampilan website Pengadilan Negeri Pulang Pisau :



- Aplikasi E-court

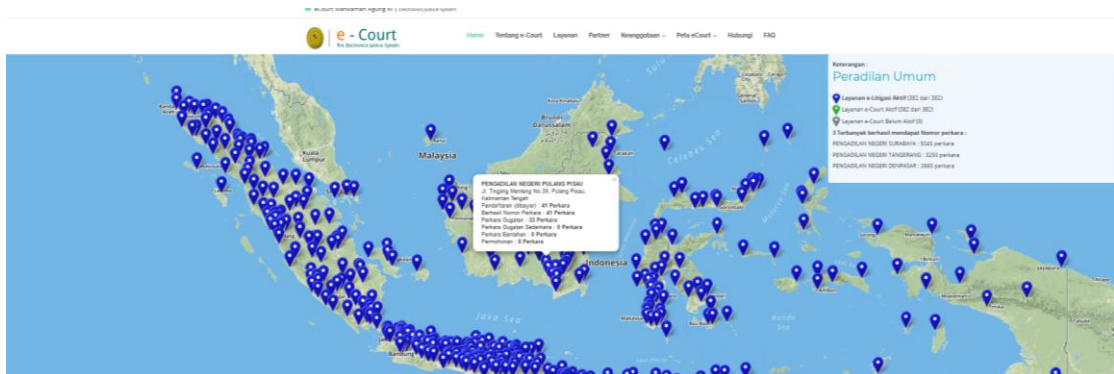
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pada tahun 2020 Pengguna aplikasi E-court pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai berikut :

<b>Pendaftaran (dibayar) : Perkara</b>
<b>Berhasil Nomor Perkara : 30 Perkara</b>
<b>Perkara Gugatan : 22 Perkara</b>
<b>Perkara Gugatan Sederhana : 0 Perkara</b>
<b>Perkara Bantahan : 0 Perkara</b>
<b>Permohonan : 8 Perkara</b>

Berikut tampilan aplikasi Eraterang pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau :



No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara
1	PN SPT-122019NPU 30 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 686.000
2	PN SPT-122019C4C 27 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 1.181.000
3	PN SPT-122019VE5 26 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 5.346.000
4	PN SPT-122019BF5 19 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 706.000
5	PN SPT-122019DE0 11 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 3.326.000
6	PN SPT-112019L3N 25 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 4.186.000

- Aplikasi Eraterang

Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk

bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja dibawahnya. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik atau yang biasa disebut dengan eraterang ini merupakan alat bantu dalam layanan pembuatan surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan, seperti :

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Selain itu, eraterang dapat memberikan informasi dengan cepat, serta memberikan keterbukaan informasi kepada publik yang saat ini sudah banyak digunakan untuk kepentingan pelayanan instansi pemerintahan. Dengan berbekal smartphone dan koneksi internet, masyarakat pengguna layanan pengadilan dapat mengakses website eraterang (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>) untuk mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan dan datang sesaat setelah permohonan mereka selesai diproses. Sehingga praktis waktu pemohon tidak terbuang untuk antri di Pengadilan setempat. Pada tahun 2020 Pengguna aplikasi Eraterang pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak 48 Surat Keterangan. Berikut tampilan aplikasi Eraterang pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau :



ID	Tanggal	Nomor Perkara	Deskripsi Perkara	Status	Nama Pengguna	Kartu Tanda Pendidik (KTP)
89	28/12/2020	4156/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selisi		62702003640002
90	22/12/2020	4456/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Sedang Diabai Hak Piditanya	Yapenty		62704408700001
91	22/12/2020	4356/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Yapenty		62704408700001
92	16/12/2020	4256/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Sedang Diabai Hak Piditanya	Jahia Mator		62702006544001
93	16/12/2020	4156/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Jahia Mator		62702006544001
94	16/12/2020	4056/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Norman		62702004730003
95	16/12/2020	3956/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Sunaryah		62702003700001
96	16/12/2020	3856/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Alpiah		62702004000003
97	16/12/2020	3756/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Dedi Isnan		62702009790001
98	16/12/2020	3656/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Bebara		62702280320027
99	14/12/2020	3556/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Sedang Diabai Hak Piditanya	H.M Kuman		62702002800003
100	14/12/2020	3456/M/12/2020/PN Pjs	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	H.M Kuman		62702002800003

- Aplikasi SIPP

Saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Pulang Pisau selalu menyesuaikan dengan versi yang terbaru. Saat ini Aplikasi SIPP menggunakan versi 4.0.1. Dengan adanya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), para user SIPP di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat melakukan pembenahan data pada SIPP. Aplikasi MIS ini merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kadah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Puluhan	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Bandung	Kasud	Peninjauan Kembali	Ekssekusi	Grasi
1	Gugatan	12	4	2	80.00 %	14	-	-	-	-	-
2	Permohonan	-	1	1	100.00 %	-	-	-	-	-	-
3	Kapitalan	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perkawinan/Berkahwin (berdian waras)	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
9	Permohonan Eksekusi	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
10	Pidana Biasa	4	5	4	80.00 %	5	-	1	-	-	-
11	Pidana Singkat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
12	Pidana Cepat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
13	Perkara Lalu-Lintas	-	90	90	100.00 %	-	-	-	-	-	-
14	Pidana Anek	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
15	Pidana Praperadilan	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-

Perangkat penunjang Teknologi Informasi

Perangkat penunjang teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

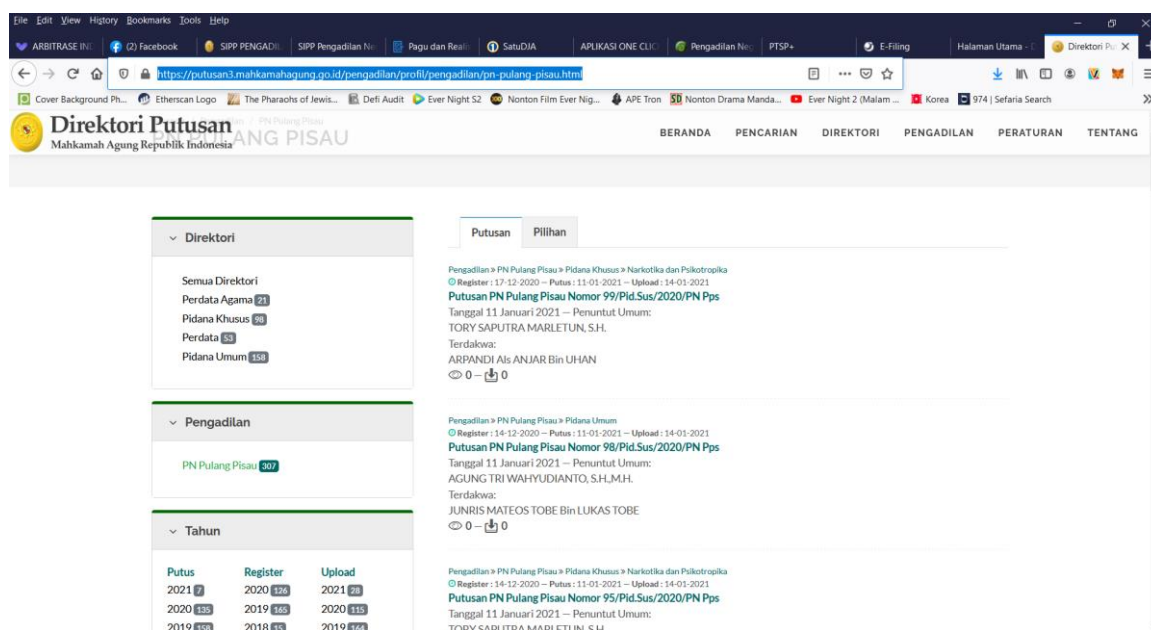
No	Jenis Perangkat (Hardware / Software)	Jumlah/uraian	Keterangan Kondisi
1	Server	2 unit	Baik
2	Mikrotik Router	1 Unit	Baik
3	Modem Internet	2 Unit	Baik
4	Switch	1 Unit	Baik
5	Koneksi Internet	2 Unit (Indihome up to 50 mbps dan Icon+ 20 mbps)	Baik
6	Hosting	VPS Hosting	Baik
7	Titik wifi access point	3 titik	Baik
8	Rak Server	1 Buah	Baik
9	PC Touchscreen	1 Buah	Baik

➤ Publikasi Perkara (One Day Publish)

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan mahkamah agung RI yang dapat di akses di situs:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pulang-pisau.html>.

Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan. Terkait hal tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di website [www.pn-Pulang-Pisau.go.id](http://www.pn-Pulang-Pisau.go.id) pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau :



Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut. Terkait dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan one day publish dimana telah ada menu khusus di aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktori putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka one day publish dengan mudah dan tepat.

## ➤ Aplikasi

Infrastruktur pendukung yang berupa perangkat lunak/software yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, instansi terkait maupun yang dikembangkan oleh TIM IT Pengadilan Negeri Pulang Pisau sendiri adalah sebagai berikut :

No	Nama Aplikasi	Pengembang	Fungsi/Kegunaan
1	SIPP	MA-RI	Penunjang Kegiatan Perkara mulai dari Pendaftaran Perkara, Putusan dan Minutasi
2	SIMAK BMN	KemenKeu	serta upaya hukum - Penatausahaan BMN di Pengadilan Negeri
3	Persediaan	KemenKeu	- Pulang Pisau
4	SIMAN	KemenKeu	- Pelaporan BMN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
5	SIMANTAP	KemenKeu	Proses Pencatatan Data Barang Persediaan Pengelolaan BMN berbasis Internet
6	SIKEP	MA-RI	Pendataan Sertifikat Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Pulang Pisau
7	KOMDANAS	MA-RI	- Sistem Manajemen SDM Mahkamah Agung - Menghimpun / mengumpulkan seluruh data kepegawaian - Menghimpun / mengumpulkan seluruh data kepegawaian
8	SAS	KemenKeu	- Membantu pelaporan dan manajemen sdm
9	RKA-KL	KemenKeu	- Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pembuatan SPM dan SPP - Pembuatan Rencana Anggaran Tahun
10	RKA-KL Online	KemenKeu	-
11	SAIBA	KemenKeu	- Anggaran mendatang - Revisi POK Tahun Anggaran berjalan
12	GPP	MA-RI	Monitoring serta Download DIPA dan ADK Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
13	SIMARI	KemenKeu	tahun anggaran berjalan - Pembuatan Gaji Induk Pegawai - Pembuatan Uang Makan Pegawai
14	KPPN	KemenKeu	- Pelaporan PNBPN Online ke Biro Keuangan
15	SIMPONI	KemenKeu	- MA RI
16	e-MONEV	KemenKeu	- Pelaporan RKA-KL Online ke Biro Perencanaan dan Program MA RI Pencatatan PNBPN Penyetoran SSBP, SSP, SSPB
17	Aplikasi e- Survey	Tim IT PN Pulang Pisau	Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap

No	Nama Aplikasi	Pengembang	Fungsi/Kegunaan
18	Aplikasi E Besuk	Tim IT PN Pulang Pisau	format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kineja pembangunan Data pendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat Mengefektifkan dan mengefisienkan Pembuatan Proses Input Besuk
19	One Klik	Tim IT PN Pulang Pisau	Aplikasi Gabungan Semua Aplikasi baik Kepaniteraan Maupun Kesekretariatan dalam Pembuatan dalam satu aplikasi

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### - Akreditasi Penjaminan Mutu

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II juga membuat Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri demi memenuhi tujuan tersebut, dan penerapannya didukung dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

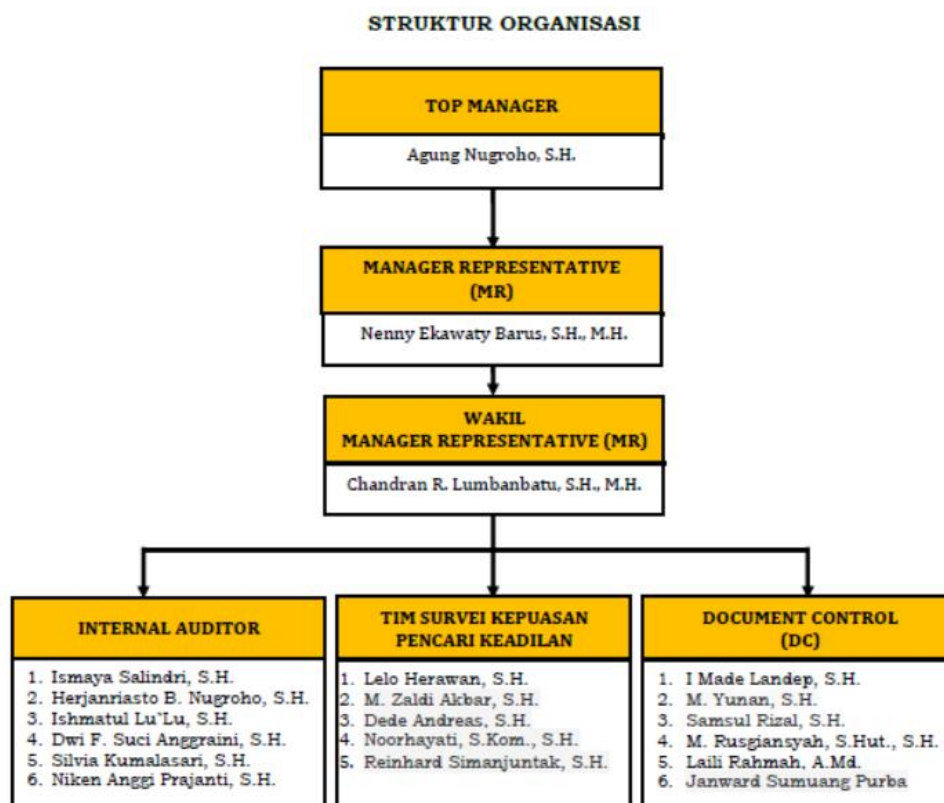
Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI dengan nilai “B”



Telah tersedia Struktur Organisasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor W16-U11/12/KPN/HK.00/SK/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*

Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE (INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT) Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020 Tahun 2020 , dan struktur organisasi sebagai berikut :



Nilai survey kepuasan masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau di semester 1 tahun 2020 adalah 79.68 dan pada Semester 2 tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 86.7%.

Perolehan Nilai untuk Survey Indeks Persepsi Korupsi untuk semester 1 tahun 2020 sebesar 3,6 (bersih dari korupsi) dengan 10 indikator penilaian dengan jumlah responden 100 dan semester 2 tahun 2020 sebesar 3,09 (bersih dari korupsi) dengan jumlah responden dengan 10 indikator penilaian dengan jumlah responden 100.

**- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini,

Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menyesuaikan Penyelenggaraan Pelayanan pada PTSP sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri memiliki tujuan antara lain untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ;



2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan ;
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan ;
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut :

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri ;
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer ;
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Tampilan Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai berikut :



Tampilan Meja PTSP dan Briefing Sebelum Pemberian Pelayanan di PTSP

## - Inovasi Pelayanan Publik

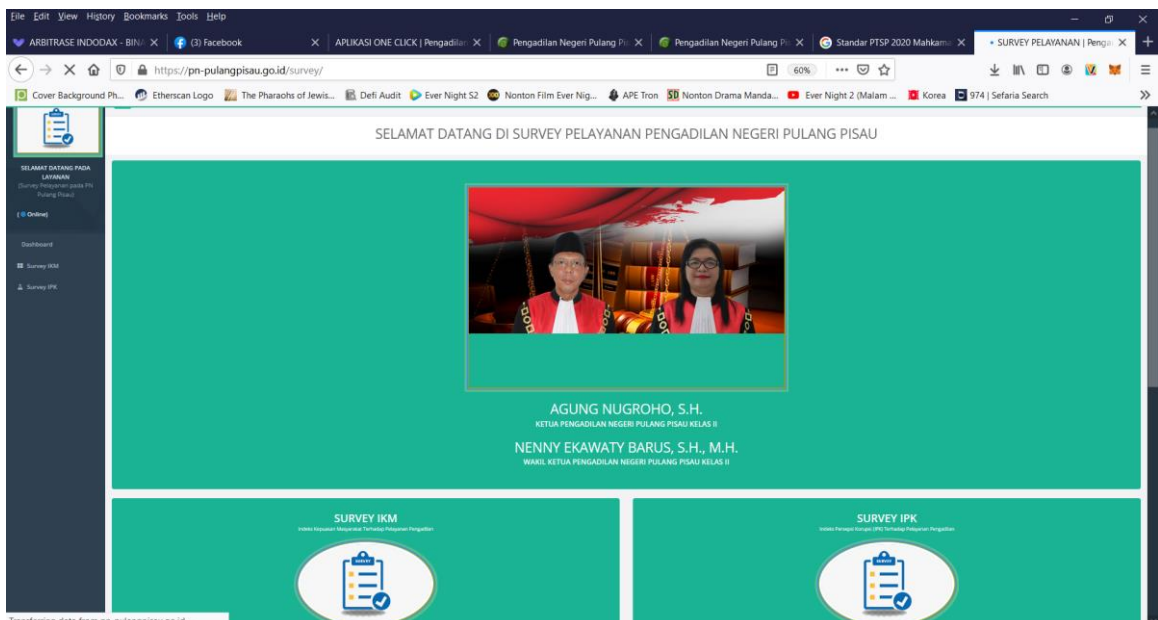
### 1. ZONA EDUKASI

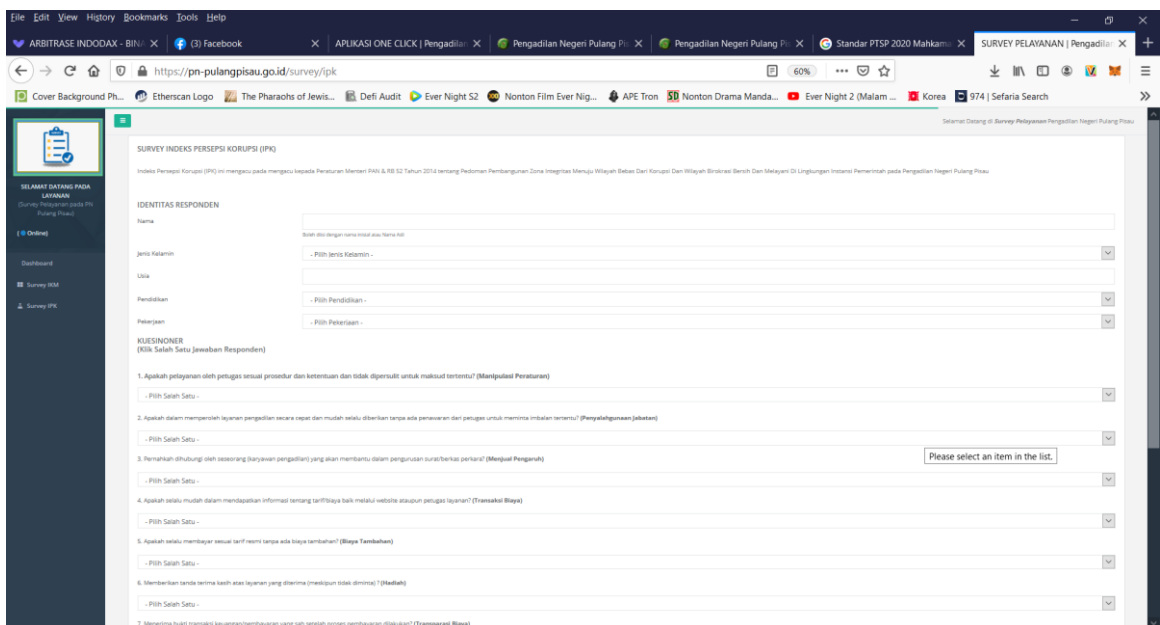
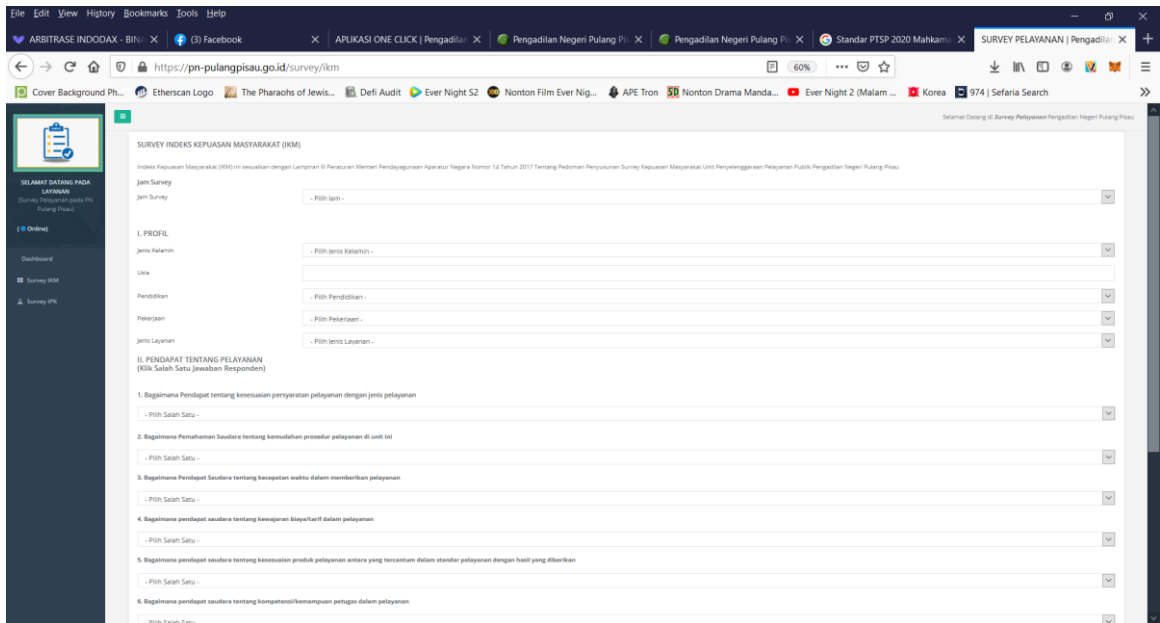
Pengadilan dalam Pelayanan Kepada Masyarakat telah memberikan Zona Internet Gratis Untuk Anak Sekolah Setiap Harinya dan telah dilakukan sosialisasikan melalui Banner pada Pengadilan negeri Pulang Pisau yang bisa diakses Masyarakat.



## 2. APLIKASI e-SURVEY

Adalah aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat pengguna pengadilan yang berbasis elektronik. Masyarakat pengguna pengadilan dapat mengisi sesuai kepuasan mereka berdasarkan layanan yang diperolehnya. Hasil dari survey tersebut yang nantinya akan menjadi data untuk dijadikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan juga Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.





### 3. APLIKASI ONE CLICK

Adalah aplikasi Internal Pengadilan yang berfungsi untuk menyatukan dan Mengintegrasikan pada Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

**Dashboard**

**DOKUMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

- SK
- SOP
- LKE APM
- Nomor

**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**

- ADK DIPA 01
- ADK DIPA 03
- INFO PAGU
- DOK. SAKIP
- MONEY SAKIP

Copyright © 2020 Pengadilan Negeri Putang Pissu. All rights reserved. All Created By

**Dokumen Daftar Asset**

Dokumen Daftar Asset

No	Kode Asset	Nomor Asset	Nama Asset	Merk Asset	Harga Satuan Asset
1	3050201003	16	Kursi Besi/Metal	Frontline	2.450.000
2	3050201003	19	Kursi Besi/Metal	Frontline	2.450.000
3	3050201003	10	Kursi Besi/Metal	Frontline	2.450.000
4	3050201003	17	Kursi Besi/Metal	Frontline	2.450.000
5	3100030303	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon (2010)	9.400.000
6	3100030303	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon (2010)	9.400.000
7	3100230304	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson D11630	5.940.000
8	3050206030	1	Camera Video	Canon EOS 8000D	9.400.000
9	3050201005	2	Size	Lokal Type 3-2-1	4.200.000
10	3050201005	3	Size	Lokal Type 3-2-1	4.200.000

Showing 1 to 10 of 104 entries. Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Copyright © 2020 Pengadilan Negeri Putang Pissu. All rights reserved. All Created By

**LKE APM SUDAH PROSES**

LKE APM YANG SUDAH ADA ADA DI DALAM APLIKASI

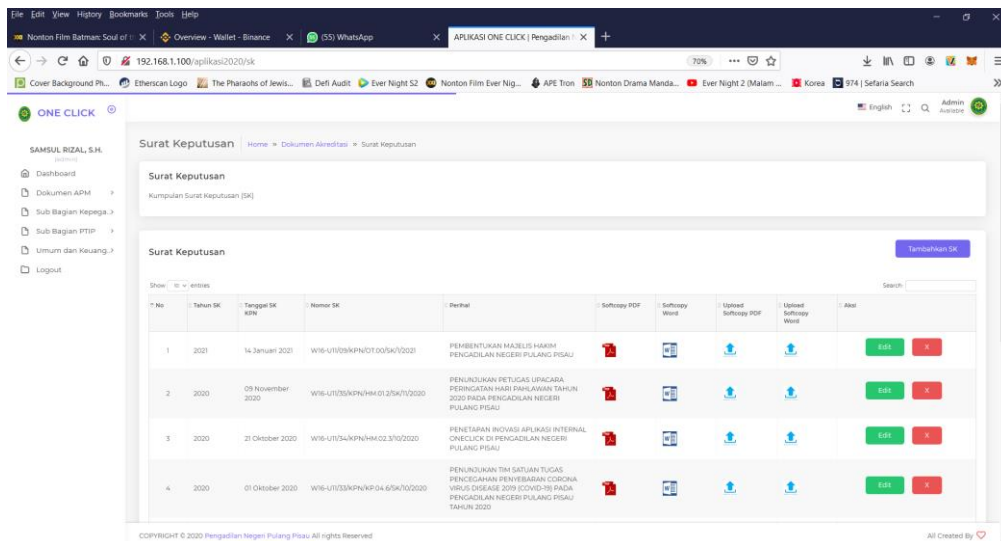
Area APM	Jumlah	Persentase Penyelesaian Dokumen
		28 Dokumen atau 100.00 % Telah diselesaikan

**LKE APM SUDAH PROSES**

LKE APM YANG SUDAH ADA ADA DI DALAM APLIKASI

Area APM	Jumlah	Persentase
Top Manajemen / Pimpinan	69	100.00%
Panitera Muda Hukum	14	100.00%
Panitera Pengganti	10	100.00%
Sarjana / Sarjana Pengganti	4	100.00%
Umum dan Keuangan	43	100.00%
Perencanaan, TI dan Pelaporan	13	100.00%
Kepegawaian, Organisasi dan Tatakelasa	24	100.00%
Management Representative	1	100.00%
Document Control (DC)	2	100.00%

Copyright © 2020 Pengadilan Negeri Putang Pissu. All rights reserved. All Created By



#### 4. KEGIATAN PENGADILAN ON AIR MEDIA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah bekerjasama dalam mengenalkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau kepada masyarakat. Kerjasama ini tertuang didalam MoU dengan Radio Lokal Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dimana Pengadilan Memberikan Informasi Mengenai Layanan Pengadilan tiap 1 Bulan sekali.



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Guna mendukung pengawasan melekat, maka Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah melakukan 3 (tiga) metode pengawasan internal yaitu :
  - a. Terbitnya SK Ketua Nomor W16-U11/10/KPN/HM.02.3/SK/5/2020 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tiap bidang dilakukan setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
  - b. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali minggu pertama untuk Panitera dengan tenaga teknis, dan minggu pertama juga untuk jajaran Kesekretariatan yang membahas capaian, kendala, pembahasan dan rencana untuk mingguan.
  - c. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali diperuntukkan bagi seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau diperlukan untuk mendapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
  - d. Pertemuan secara insidentil untuk pimpinan pengadilan dan hakim atau pimpinan pengadilan dan jajaran kepaniteraan dan sekretariatan sebagai sarana pengawasan manajerial di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Selama tahun 2020, di Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah dilaksanakan pengawasan Internal dan Eksternal baik secara online maupun offline.

## B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim Pengawas menyarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan guna meningkatkan kebersamaan, keakraban dan kualitas kinerja seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pulang Pisau antara lain :

1. Pembinaan mental, Spiritual dan kesehatan
  - Sepeda







- Jalan Sehat Bersama





- Perlombaan



– Rapid Test



– Penyemprotan Rutin



2. Family Gathering di Tempat Rekreasi banjarmasin



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Secara umum, seluruh kegiatan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II pada bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat banyak kendala, antara lain jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat kurang proporsional, sehingga berpengaruh kepada penyelesaian tugas, pokok dan fungsi Peradilan.

#### **B. REKOMENDASI**

Adapun saran-saran guna peningkatan kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, antara lain :

1. Mohon kiranya agar pada tahun 2021 adanya Penambahan Aparatur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2. Mohon agar Pengadilan Tinggi sering mengadakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dikarenakan Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan Satuan kerja Baru yang memerlukan Pelatihan dan Bimbingan Teknis.